

PENGARUH MONEY POLITIK TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DI DESA BONGO KECAMATAN BOKAT KABUPATEN BUOL

Moh Triadityansyah,¹ Liswan Lumalu,² Alisahab,³ Ismail Buna,⁴

Prodi S2 PPKn Universitas Negeri Gorontalo,¹ Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan,² Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo,³ Bawaslu Kabupaten Gorut,⁴

Email:

mohtriadityansyah90@gmail.com,¹ liswanlumali2808@gmail.com,² ali.sahap29@gmail.com,³
ismailbuna11@gmail.com,⁴

Abstract:

The goal of this research is to determine what causes people to become entangled in money politics in Bongo Village, Bokot District, and how the phenomenon of money politics influences people's political participation in the community. This study employed qualitative research methods, and the data collected will be examined and explained in light of the facts discovered during the fieldwork. The study was conducted in Bongo Village, in the Buol Regency area of Central Sulawesi. The study's findings support the notion that the primary players in money politics are those who are most closely associated with economic constraints. These constraints are the root cause of money politics and have historically created a number of new issues, including the creation of venues for it to occur in society.

Riwayat Artikel:

Submissions : 06-12-2023

Accepted : 08-12-2023

Published : 23-12-2023

Keywords:

Influence, Political
Money, Community
Participation

Abstrak:

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana fenomena politik uang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat di Desa Bongo, serta faktor apa sebenarnya yang menyebabkan masyarakat kurang mendukung politik uang di Desa Bongo Kecamatan Bokot. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif, dimana data yang dikumpulkan akan dianalisis dan dirangkum berdasarkan temuan penelitian lapangan. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, atau lebih tepatnya Desa Bongo. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab utama volatilitas mata uang adalah perekonomian, yang berarti volatilitas mata uang belum sepenuhnya independen terhadap volatilitas perekonomian. Hal ini termasuk menciptakan peluang terjadinya volatilitas mata uang di masyarakat. Alasan penyimpangan ini adalah politik mata uang yang telah berlangsung selama beberapa waktu.

Kata Kunci :

Pengaruh, Money
Politik, Partisipasi
Masyarakat



Journal pages can be accessed
via this barcode

PENDAHULUAN

Partisipasi merupakan bentuk refleksi diri dan kebencian pada diri setiap individu (Suharyanto, 2014). Politik sebagai warga negara biasa dapat dibandingkan sebagai aktivitas partisipasi politik, yang menyebarkan dampak pada proses produksi dan pelaksanaan kebijakan umum, termasuk pemilihan kepala negara. (Damsar, 2010:181).

Dikatakan dalam sebuah tatanan negara demokrasi, partisipasi politik merupakan aspek penting dan ciri khas adanya modernisasi politik. Secara umum, dalam masyarakat tradisional, esensi kepemimpinan politik lebih kuat diwakili oleh kelas elit, prajurit bangsa yang berperang, dan relatif sedikitnya jumlah kekayaan yang dinikmati penduduk suatu bangsa. Warga negara yang hanya terdiri dari penduduk pedesaan lambat laun semakin terpinggirkan dalam proses politik (Sudijono Sastroatmodjo, 1995. hlm. 56).

Dalam kaitannya juga terhadap pemilihan, partai politik mempunyai dampak negatif terhadap legitimasi publik terhadap tindakan suatu pemerintahan tertentu. Dalam sebuah penelitian, misalnya, partisipasi politik berdampak negatif terhadap legitimasi publik terhadap anggota masyarakat yang lebih lemah.

Setiap masyarakat memiliki preferensi dan kepentingan masing-masing untuk mengecam pilihan mereka dalam pemilu. Dapat dikatakan bahwa lamanya seorang pegawai negeri menduduki jabatan tertentu tergantung pada preferensi masyarakat sebagai pemilih. Tidak hanya itu, partisipasi politik warga negara dalam pemilu juga dapat

dipandang sebagai sarana kontrol warga terhadap suatu pemerintahan tertentu. Pengendalian yang diberikan berbeda-beda tergantung dengan tingkat partisipasi politik masing-masing.

Selain sebagai salah satu aspek demokrasi, partai politik juga mempunyai kaitan yang erat dengan pelaksanaan undang-undang politik nasional. Salah satu hasil dari perdebatan politik adalah perlunya setiap warga negara untuk menyatakan kesediaannya untuk membayar dan berpartisipasi. Menurut Tia Subekti (2014), salah satu poin penting dalam UUD 1945 ayat 28 adalah “kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya yang ditetapkan dengan undang-undang.”

Partai politik mempunyai hubungan yang erat antara kehati-hatian politik dan kepercayaan terhadap pemerintah. Dengan demikian, masyarakat berpartisipasi dengan demokrasi. Politik, demokrasi, dan legitimasi memiliki ikatan yang sangat kuat satu sama lain.

Politik yang dibarengi dengan demokrasi berdampak negatif terhadap legitimasi masyarakat terhadap suatu pemerintahan tertentu. Dalam sebuah penelitian, misalnya, partisipasi politik berdampak negatif terhadap legitimasi publik dari sudut pandang masyarakat miskin. Setiap masyarakat mempunyai preferensi masing-masing dan kebutuhan untuk menentukan pilihannya sendiri dalam pembelian.

Partisipasi politik Indonesia Dalam pemilu dapat dipahami sebagai kendali rakyat terhadap suatu pemerintahan tertentu.

Besarnya kendali yang ditawarkan berbeda-beda, bergantung pada tingkat partisipasi politik dalam setiap kasus individu. Selain sebagai salah satu aspek demokrasi, partai politik juga mempunyai kaitan yang erat dengan pelaksanaan undang-undang politik nasional.

Saat ini banyak permasalahan ketika menjelang kontestasi politik tiba, diantaranya yang paling menonjol yakni politik uang, politik uang adalah proses melakukan kesepakatan dengan pembeli dengan memberikan sejumlah besar uang atau bahkan pinjaman agar preferensi pembeli dapat dibicarakan dengan penjual. Selain itu, politik uang digambarkan sebagai bentuk tawar-menawar dalam perjalanan politik dan pemerintahan. Tindakan seperti ini dapat terjadi pada saat pemilihan umum indakanve, eksekutif, atau pemilihan kepala desa. Selain itu, kebijakan mata uang sering kali digambarkan sebagai upaya untuk merugikan orang lain dengan keadaan yang terjadi saat ini. (Faijah Mardiah, Ilham Zitri, 2023).

Eksperimen politik uang ini kemungkinan besar akan melahirkan fenomena patronase dan klientelisme. Sedangkan Klientelisme merupakan salah satu jenis konseling personal dimana terdapat harapan dan kebutuhan yang tidak terucapkan dan tidak saling eksklusif di antara partai-partai yang sedang berjuang. Selanjutnya dapat dibedakan dengan kegiatan Patron yang memberikan akses kepada pelanggan dalam bentuk promosi terkini. Sehingga tercipta hubungan saling menguntungkan yang akan selalu bermanfaat (Aspinall dan berenschot, 2019; Aspinall dan Hicken, 2019).

Politik uang merupakan istilah luas yang juga dibahas di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 Huruf J tentang Kependudukan Universal, yang menyatakan bahwa “Pemangku kepentingan, anggota, dan peserta kampanye pemilu didorong untuk menyumbangkan uang atau sumber daya lainnya kepada pemerintah. anggota kampanye pemilu.”

Ketentuan mengenai politik uang secara umum telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 73 ayat (1), dimana calon dan/atau kampanye dilarang menggunakan uang atau cara lain untuk merugikan hak pembelian dan/atau kampanye. penjualan barang. Di sisi lain, frasa “singsi pidananya” muncul pada ayat 187 A ayat (1) yang mengungkapkan bahwa “setiap orang yang berbudi luhur akan berusaha menerapkan hukum terhadap orang perseorangan atau kelompok dalam bangsa Indonesia, baik secara diam-diam.” atau dengan cara yang tidak diam, untuk mencegah orang menggunakan undang-undang atau menggunakannya dengan cara yang membuat mereka terkesan tidak pantas untuk memiliki undang-undang saat ini atau sebelumnya.

Dengan demikian, ayat 73 ayat 4 menggambarkan penjara yang paling pendek 36 bulan dan paling lama 72 bulan, dengan minimal Rp. 200.000.000 dan maksimal Rp. 1000.000.000.

Al Arif, Faizulhaq (2023). Tulisan ini memakai analisis regresi juga dengan pendekatan kuantitatif, analisis multivariat (manova), dan analisis faktor. Populasi penelitian ini mencakup seluruh warga Kota Malang dengan kriteria berusia di atas 17 tahun,

berdomisili dan asli Kota Malang, serta sudah pernah melakukan pencoblosan (pemilu/pilkada). Kemudian hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa politik uang berada pada kategori sedang, partisipasi politik pada kategori tinggi, dan keputusan memilih pada kategori sedang. Dan adanya pengaruh dari politik uang terhadap partisipasi politik maupun keputusan memilih sebesar 2,4% dan 5,7% atau 97,6% dan 94,3% dipengaruhi oleh faktor lainnya.

Syahriah Ramadani (2022). Penelitian ini merupakan jenis penelitian sosio-legal dengan menggunakan metode studi kasus, yaitu pendekatan penelitian kualitatif desk-restriktif. Penelitian ini dilakukan di Desa Pulau Satu Kabupaten Tanah Bumbu. Uang atau barang yang mengakuijukkan sebagai subjek penelitian, sebagaimana tokoh masyarakat, ketua Rukun Tetangga, dan beberapa masyarakat di Desa Pulau Satu yang mengikuti Pilkada 2020. Kemudian pengumpulan datanya meliputi dokumentasi, observasi, dan angket. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa politik uang umumnya ada di Desa Pulau Satu; Masyarakat setempat menyebut politik uang semacam ini sebagai “politik fajar”.

Mahdiana (2021). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode empiris dan pendekatan kuantitatif. Data dikumpulkan dengan metode penyebaran Kuesioner pada 46 sampel, dengan rincian 37 responden mengikuti pembelian ketua RT 01 dan 9 responden tidak mengikuti pembelian ketua RT 01. Besarnya sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin dan teknik Non-Probability Sampling.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1. Memahami politik mata uang Desa Sungai Panangah. 2. Partisipasi masyarakat dalam pengadaan tanah RT 01 di Desa Sungai Panangah. 3. Dampak politik mata uang terhadap partisipasi masyarakat dalam proses pendaftaran RT 01 di Desa Sungai Panangah. Salah satu faktor yang berdampak negatif terhadap partisipasi masyarakat adalah adanya kejadian-kejadian, yaitu kejadian yang sering terjadi pada musim pemilu; yang paling menonjol adalah politik mata uang.

Fhira Alfhiera (2022). Metode penelitian Naskah ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang didasarkan pada penelitian pustaka. Data yang telah dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif.

Adapun hasil penelitian ini : pertama, tingkat partisipasi masyarakat Desa Marikangen dalam pilkades 2021 ini sangat antusias mulai dari tahap pencalonan/penjaringan. Kedua, faktor dominan dalam pemilihan kepala desa dilatar belakangi oleh faktor pengaruh pemberian uang/barang, faktor keberadaan tim sukses dan tokoh masyarakat. Ketiga, kepemimpinan dan partisipasi politik dalam pemilihan kepala desa ini belum sesuai dengan kaidah yang ada dalam perspektif fiqh siyasah. Karena masih banyak masyarakat yang berselisih paham dan tidak adanya toleransi.

METODE PENELITIAN

Metode analisis yang diterapkan dikenal dengan teknik analisis kualitatif. Tujuan dari metodologi penelitian kualitatif adalah untuk

memberikan penjelasan yang jelas dan akurat tentang suatu fenomena sosial tertentu. ketekunan penelitian ini adalah pendekatan dengan metode kualitatif deskriptif.

Informasi yang dikumpulkan akan dianalisis dan dirangkum berdasarkan studi pencarian fakta yang dilakukan dilokasi (Patrick J. Rimbing, 2015: 6). Tulisan ini memperluas lokasi yang diteliti di seluruh daerah Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, lebih tepatnya di Desa Bongo. Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisisnya adalah individu-individu dalam kelompok atau organisasi terkait yang telah dibentuk secara diam-diam atau tepat waktu dalam praktik politik mata uang yang dilakukan, baik sebagai praktisi politik mata uang maupun sebagai komunitas yang mendapat manfaat dari politik mata uang tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Perubahan Uang Politik

Faktor Ekonomi Negatif

Alasan terjadinya Perubahan uang politik tidak terlepas juga atas keterpurukan ekonomi yang terus terjadi sampai sekarang. Hal ini termasuk munculnya isu-isu baru dan peluang politik kotor yang terjadi di masyarakat. Dapat dikatakan Bahwa kemiskinan semacam ini menyebabkan masyarakat menjadi rasional untuk meraup banyak manfaat, termasuk ketika mereka menuai keuntungan dari kontestasi politik atau calon. Politik uang bisa jadi sulit untuk dipahami dan diterapkan jika perubahan ekonomi dan kemiskini terus berdampak negatif pada masyarakat kita (Ina Ulfa Fitriani, 50 | Moh Triadityansyah et al, (2023)

L Wiresapta Karyadi, Dwi Setiawan Chaniago, 2019).

Peran ekonomi dan sumber daya finansial dalam praktik politik uang merupakan aspek krusial yang perlu diperhatikan. Penelitian ini menegaskan bahwa kemampuan finansial kandidat dan partai politik memiliki pengaruh signifikan terhadap kemungkinan terlibat dalam praktik politik uang. Kandidat yang memiliki dana yang cukup besar bisa jadi memiliki kekuatan yang besar untuk memanfaatkannya dalam upaya memenangkan pemilihan. Mereka dapat menggunakan sumber daya ini untuk memberikan imbalan finansial kepada pemilih potensial.

Selain itu, sumber daya finansial yang mencukupi juga dapat digunakan untuk mengamankan sumber daya politik yang penting, seperti media massa dan kampanye yang efektif. Kandidat yang memiliki dana lebih besar memiliki akses yang lebih mudah ke media yang dapat membentuk opini publik dan memengaruhi pemilih. Oleh karena itu, praktik ekonomi politik bukan sekedar memberikan uang. kepada pemilih, melainkan tentang menciptakan ketidaksetaraan dalam akses terhadap sumber daya politik yang penting.

Kemudian hal ini dapat menggoyahkan prinsip dasar demokrasi yang menyatakan bahwa setiap suara memiliki nilai yang sama. Dengan memahami peran penting sumber daya finansial dalam proses ekonomi uang, langkah-langkah dapat diambil untuk membatasi pengaruh finansial yang tidak seimbang dalam pemilihan dan menjaga integritas demokrasi.

Faktor Rendahnya Pendidikan

Penyebab menurunnya standar pendidikan yang dimiliki masyarakat umum. Sayangnya, hal ini tidak terlepas dari lemahnya faktor perekonomian yang menyebabkan masyarakat kurang mempunyai kemauan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi; Sebaliknya, kedua faktor ini saling berkaitan erat, sehingga memperburuk keadaan pola pikir dan perilaku mereka ketika melakukan sesuatu. Rendahnya kualitas pendidikan ini pada akhirnya menyebabkan masyarakat memiliki pemahaman yang tajam tentang politik dan tantangan yang dihadapi negara.

Pada dasarnya ketidaktahuan Masyarakat seperti ini mempersulit mereka untuk memahami keadaan politik mata uang saat ini, terbukti dari betapa sederhananya masyarakat dalam menerima sejumlah imbalan yang diberikan, kemudian sangat mudah pihak-pihak tertentu terpengaruh untuk memilih calon atau kontestan politik, hingga adanya sikap pragmatis di masyarakat membuat mereka semakin memiliki ketidakpedulian terhadap pelanggaran yang ada, dan pada akhirnya memburuk sampai pada titik di mana partisipasi politik menjadi relatif rendah.

Faktor Tradisi (Budaya Politik)

Politik mata uang yang sering terjadi di masyarakat pada akhirnya akan menimbulkan bias yang berkepanjangan. Penyebabnya adalah praktik politik mata uang yang sudah berlangsung cukup lama, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap praktik politik mata uang yang terjadi pada pemilu. Kesadaran masyarakat luas akan hal ini akan

menyebabkan praktik politik mata uang semakin tidak menentu, bahkan menjadi bias dalam memilih, dan masyarakat semakin yakin bahwa hal-hal tersebut di atas adalah fakta kehidupan. Hal ini akan menimbulkan kepercayaan masyarakat luas praktek politik negatif yang mengakibatkan terlalu sering dilakukan paling banyak ketika masa pemilu.

Peran budaya politik dan norma sosial dalam mendorong praktik politik uang dalam pemilu adalah aspek yang perlu mendapat perhatian serius dalam upaya memahami dan mengatasi masalah ini. Budaya politik dalam konteks ini merujuk pada nilai-nilai, norma, dan praktik yang berkaitan dengan politik di masyarakat. Beberapa kasus, kasus politik uang telah menjadi bagian dari budaya politik di beberapa daerah di Indonesia.

Politik uang dianggap sebagai norma yang diterima secara sosial, di mana calon politik diharapkan untuk memberikan uang kepada pemilih sebagai bagian dari kampanye mereka. Norma ini menciptakan tekanan sosial pada calon politik untuk terlibat dalam praktik politik uang, bahkan jika mereka memiliki niat yang baik.

Dampak Terjadi nya Politik Uang

Politik mata uang yang diakibatkannya ibarat dampak yang panjang; jika terus berlanjut, akan merugikan semua orang, tidak hanya satu orang merugikan masyarakat secara keseluruhan, bahkan dapat merugikan Negara dengan adanya berbagai permasalahan baru yang kemungkinan terjadi akibat politik mata uang ini. Pengaruh politik mata uang ini juga dapat melemahkan demokrasi di suatu negara; Oleh karena itu, jika dibiarkan maka

akan menimbulkan permasalahan baru bagi masyarakat, bahkan bagi bangsa itu sendiri mental generasi penerus yang akan membawa dampak buruk bagi kesejahteraan jumlah penduduk dan potensi kelompok tertentu di masa depan. Oleh karena itu, praktik politik mata uang ini perlu segera dibuktikan kebenarannya mencari berbagai kemungkinan penyebab terjadinya kemudian mencari solusi bertahap untuk memberantas praktek ekonomi politik itu sendiri.

Politik uang atau disebut juga politik pertukaran sangat merugikan demokrasi Indonesia.. Juga akan menghasilkan pemimpin yang kurang berkompeten, selain itu, politik uang akan melemahkan institusi dan politik demokrasi itu sendiri. Calon atau partai saat ini yang menggunakan politik mata uang menentukan siapa yang perlu dipertimbangkan dalam pemilu telah menjamin martabat rakyat. Sara dan martabat masyarakat tidak sejalan dengan apa yang akan terjadi lima tahun ke depan.

Kemudian Kebijakan mata uang adalah fondasi Rakyat. Seseorang yang menggunakan politik mata uang untuk mencapai tujuan mereka, kemungkinan besar, akan mengikis kekuatan rakyat. Dalam hal ini, rakyat tidak dimanfaatkan untuk bersama-sama memajukan agenda perubahan; sebaliknya, ini digunakan hanya untuk kepentingan nyanyian calon; setelah calon terpilih, tidak akan ada apapun yang bisa digunakan karena nyanyiannya akan mati setelah lima tahun atau periode tertentu untuk menghilangkan semua kesalahan. Politik mata uang akan dipengaruhi oleh korupsi. Praktik politik negatif ini sering muncul karena

sebuah bentuk penyelewengan APBD dimana terjadi kerjasama antara eksekutif dan legislatif. Legislatif berhadir dengan fungsi kontrol atau pengawasan tidak berfungsi secara maksimal. Hal ini terkait dengan poin kedua yang disebutkan di atas, dimana tujuan dilakukannya korupsi adalah untuk menangkai musibah yang terjadi pada masa kampanye, dimana para pejuang terlibat dalam politik mata uang. Dan yang terakhir Politik Uang Membunuh Transformasi Masyarakat.

Maka transformasi atau perubahan masyarakat akan semakin benci dan bahkan berbalik melawan pemerintah jika proses demokrasi disubordinasikan pada politik ekonomi. Tujuan-tujuan tersebut jelas tidak realistis karena jika tercapai, mereka akan menggunakan seluruh energi mereka untuk membalikkan semua kerugian yang terjadi selama kampanye, termasuk kerugian yang diakibatkan oleh jual-beli suara dalam politik mata uang.

SIMPULAN

Faktor Terjadinya ekonomi politik yang paling menonjol yakni terkait faktor ekonomi negatif alasan terjadinya politik mata uang tidak sepenuhnya lepas dari keterpurukan ekonomi yang terus berlanjut hingga saat ini. Hal ini termasuk munculnya isu-isu baru dan peluang politik mata uang di masyarakat. Dampak ini terjadi karena praktik politik uang yang terjadi selama ini, masyarakat tidak mengetahui praktik demokrasi yang negatif selalu terjadi dalam pesta demokrasi, rendahnya pengawasan yang kurnangnya pengetahuan serta kesadaran.

Peran budaya politik dan norma sosial dalam mendorong ekonomi politik dalam

pemilihan umum adalah aspek yang perlu mendapat perhatian serius dalam upaya memahami dan mengatasi masalah ini. Dampak terjadi nya Uang Politik Konsekuensi dari politik mata uang ini mirip dengan dampak jnagka panjang, artinya jika hal ini terus berlanjut maka akan berdampak pada setiap individu dan bukan hanya masyarakat umum. Bahkan dapat berdampak pada bangsa dengan menimbulkan berbagai krisis baru yang mungkin timbul akibat politik mata uang tersebut.

Patrick Jimvrey Rimbing. 2015. Money Politics Dalam Pemilihan Legislatif Di Kota Manado Tahun 2014 (Suatu Studi Di Dapil 1 Kecamatan Sario Dan Kecamatan Malalayang)

Lina Ulfa Fitriani, L Wiresapta Karyadi, Dwi Setiawan Chaniago (2019). Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif Di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat.

DAFTAR RUJUKAN

Faijah Mardiah, Ilham Zitri (2023). Pengaruh Praktik Politik Uang Terhadap Penyelenggaraan Pilkada Kota Mataram. Volume 10. No 1. Page:78-92

Suharyanto, A. (2014). Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa Dalam Pemilihan Kepala Daerah. Jppuma: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area, 2(2), 151–160.

Damsar. (2010). Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta. Kencana Prenada Media Grup.

Sudijono Sastroatmodjo (1995). Perilaku Politik. Semarang: Ikip Semarang Press. Hlm. 56

Tia Subekti, (2014). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum: Studi Turn Of Voter Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013